



Penandatanganan Mou Kerja Sama Kementerian Keuangan Republik Indonesia Dan Kementerian Keuangan Republik Belarus

Jakarta, 13 April 2015– Dalam rangka meningkatkan kerja sama bilateral antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Kementerian Keuangan Republik Belarus, pada tanggal 13 April 2015 telah ditandatangani naskah *Memorandum of Understanding (MoU) on Cooperation between the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia and the Ministry of Finance of the Republic of Belarus*.

Penandatanganan MoU tersebut dilaksanakan di Aula Djuanda, Lt. Mezzanine, Gedung Djuanda I, kompleks Kementerian Keuangan Jakarta. Menteri Keuangan, Bambang P.S. Brodjonegoro bertindak sebagai wakil dari Kementerian Keuangan R.I. dan H.E. Vladimir Lopato-Zagorsky, Duta Besar Republik Belarus untuk Indonesia mewakili Republik Belarus. Acara tersebut dihadiri oleh delegasi dari Kedutaan Besar Belarus, perwakilan dari Kementerian Luar Negeri R.I. dan perwakilan dari Kementerian Keuangan R.I., yang meliputi berbagai unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan.

Kedua pihak sepakat untuk memperkuat kerja sama di bidang-bidang yang menjadi kewenangan kedua Kementerian Keuangan, yang meliputi pertukaran pandangan dan berbagi pengalaman dalam beberapa bidang yaitu (i) peraturan perundang-undangan mengenai anggaran, pajak dan kebijakan fiskal; (ii) pengaturan perpajakan; (iii) peraturan perundang-undangan terkait kawasan bebas bea atau kawasan ekonomi serupa; (iv) penerbitan obligasi internasional; (v) pengalaman terkait kerja sama dengan organisasi internasional; dan (vi) bidang lainnya yang disepakati oleh kedua belah pihak. Kerja sama dimaksud kemudian dituangkan ke dalam *Cooperation between the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia and the Ministry of Finance of the Republic of Belarus*.

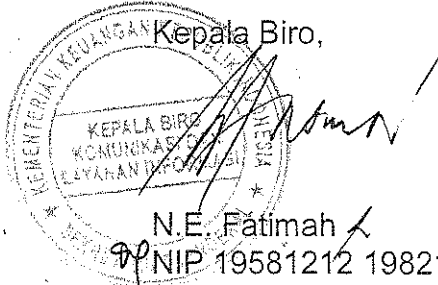
Acara penandatanganan MoU dibuka oleh Dr. Suahasil Nazara, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan R.I. Dalam sambutannya, Kepala BKF terlebih dulu memaparkan secara singkat mengenai proses pembentukan MoU antara kedua Kementerian Keuangan yang akan ditandatangani, di mana inisiatif pembentukan MoU bermula dari kunjungan kenegaraan Presiden Belarus ke Indonesia pada bulan Maret 2013, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan kedua negara melalui negosiasi untuk membahas *draft* MoU hingga tercapainya kesepakatan oleh kedua pihak atas *draft* MoU tersebut.

Kepala BKF menyatakan bahwa penandatanganan MoU ini menandai tahap baru dalam hubungan kedua pihak. MoU ini menyediakan *platform* bagi kedua pihak untuk mengembangkan sejumlah kerja sama ekonomi yang lebih luas di berbagai bidang, termasuk yang terkait dengan kewenangan kementerian lainnya. Oleh karena itu, Kepala BKF mengajak para pimpinan di unit-unit di Kementerian Keuangan untuk terlibat secara lebih aktif dalam mengeksplorasi peluang kerja sama dari MoU ini dan berkoordinasi dengan mitra dari berbagai lembaga/kementerian lainnya agar MoU dapat memberikan manfaat bagi kedua negara.

Duta Besar Vladimir dalam sambutannya menyampaikan bahwa hubungan bilateral Indonesia-Belarus mengalami perkembangan yang tinggi beberapa tahun belakangan ini, dan dengan adanya MoU ini diharapkan dapat memperkuat hubungan ekonomi antara Indonesia dan Belarus. MoU dimaksud akan melengkapi kerangka kerja sama ekonomi yang luas yang telah dimiliki antara kedua negara. Wujud nyata dari MoU ini dapat segera dilihat dengan penyelenggaraan seminar pertama di Belarus pada saat kunjungan delegasi Indonesia pada acara *the 5th session of the Intergovernmental Commission on Trade, Economic, Scientific and Technical Cooperation* yang direncanakan akan diselenggarakan akhir tahun ini di Belarus.

Sementara itu Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro dalam sambutannya menggarisbawahi tantangan yang harus diwaspadai oleh berbagai negara di dunia, diantaranya: kebijakan fiskal, moneter, dan keuangan yang diambil dalam upaya mengatasi masalah struktural, fluktuasi harga komoditas, dan resiko aliran balik modal asing yang dapat berdampak terhadap nilai tukar. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah perlu merumuskan kebijakan ekonomi yang tepat dan relevan, yang tentunya membutuhkan pengetahuan yang luas serta analisis dan pertimbangan yang mendalam. Menteri Keuangan yakin bahwa MoU ini akan menyediakan landasan yang kuat untuk meningkatkan kerja sama kedua negara di dalam bidang-bidang tersebut melalui berbagi dan bertukar pengetahuan serta pengalaman dalam mengelola perekonomian sebagai bahan pelajaran bagi kedua kementerian. Menteri Keuangan juga menekankan pentingnya komitmen yang kuat dari kedua negara dalam melaksanakan MoU tersebut.

Menteri Keuangan menyampaikan bahwa setidaknya terdapat dua rencana aksi yang dapat ditempuh terkait implementasi MoU, yakni: (i) *high level policy dialog*, termasuk di bidang perpajakan dan pengelolaan utang negara dan (ii) pertukaran pegawai kedua kementerian. Menteri Keuangan menyatakan bahwa keberhasilan dari MoU ini dapat menjadi batu loncatan bagi kedua negara untuk mengembangkan lebih banyak kerja sama di berbagai bidang.

Kepala Biro,

N.E. Fatimah
NIP 19581212 198210 2 001

Informasi lebih lanjut hubungi:

Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral
Badan Kebijakan Fiskal
Gd. R.M. Notohamiprodjo Lt. 7
Jl. Dr. Wahidin Raya, Jakarta 10710
Telp. (021) 345.1128, Fax. (021) 345.1205